

Analisis Dampak Pelemahan Rupiah: Akar Masalah, Implikasi, dan Respons Kebijakan

Key Contents:

- Perkembangan Nilai Tukar Global, Regional, dan Rupiah
- Faktor Global dan Domestik
- Indikator Fundamental dan Non-Fundamental
- Asumsi Makroekonomi dan Simulasi Dampak terhadap APBN 2026
- Respons Kebijakan Otoritas
- Kesimpulan dan Rekomendasi

Keywords:

Pelemahan Rupiah, Ketidakpastian Global, Capital Outflow, Sentimen Pasar, Kebijakan Otoritas

Artikel ini dirampungkan pada Juni 2026. Dapat diakses melalui <https://insight-ecobank.co.id>

Pendahuluan

Rupiah kembali mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global dan domestik. Per Juni 2026, Rupiah tercatat melemah hingga menyentuh nilai psikologis Rp18.100 per dolar AS yang merupakan rekor terlemah baru sejak tahun lalu. Dibandingkan rata-rata pergerakan nilai tukar tahun 2025, Rupiah melemah sekitar 8,3%, bergerak dari rentang Rp16.200-Rp16.600/USD hingga menembus level kritis saat ini. Rupiah bahkan sempat menjadi salah satu mata uang dengan nilai tukar terlemah di dunia menurut Forbes (April 2026), tepat di bawah Kip Laos (LAK) dan Dong Vietnam (VND). Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi biasa; dampaknya dapat mengancam daya beli masyarakat, memicu inflasi impor, terutama karena Indonesia merupakan *net importer* energi, menambah beban utang luar negeri pemerintah, serta meningkatkan biaya produksi perusahaan. Pelemahan Rupiah yang semakin dalam tentu dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Oleh sebab itu, fenomena pelemahan Rupiah saat ini tidak hanya menjadi perhatian pelaku pasar, tetapi juga masyarakat luas yang khawatir akan dampaknya terhadap harga barang dan daya beli.

Jika dibandingkan secara historis, fenomena pelemahan Rupiah saat ini berbeda dengan fenomena pelemahan Rupiah saat Krisis Moneter 1998. Pada Krisis Moneter tahun 1998, Rupiah sempat anjlok ke kisaran Rp17.000/USD, bergerak dari kisaran Rp2.500/USD atau melemah sekitar 580%. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi dan keuangan yang kompleks pada masa itu, ditandai dengan adanya gejolak di sektor keuangan, tingginya utang luar negeri swasta dan pemerintah, serta krisis kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dampak dari krisis tersebut membuat perekonomian Indonesia terpuruk dalam beberapa waktu. Berbeda dengan kondisi saat ini, pelemahan rupiah saat ini terjadi ketika sejumlah indikator makroekonomi domestik masih menunjukkan kondisi yang relatif resilien. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5%, inflasi terkendali dalam rentang sasaran Bank Indonesia, serta stabilitas sistem keuangan masih terjaga. Bahkan, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa nilai tukar Rupiah saat ini berada pada kondisi *undervalued*, yaitu berada di bawah nilai yang mencerminkan fundamental ekonominya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting. **Pertama**, faktor apa yang menjadi pendorong utama pelemahan Rupiah, apakah berasal dari tekanan eksternal atau kerentanan domestik? **Kedua**, apakah pelemahan tersebut mencerminkan memburuknya fundamental nilai tukar itu sendiri, atau juga dipengaruhi oleh faktor non-fundamental seperti sentimen pasar, persepsi risiko investor, dan dinamika arus modal?

Artikel ini bertujuan menganalisis akar penyebab pelemahan Rupiah yang terjadi sejak awal tahun 2026 dengan mengkaji interaksi antara faktor global dan domestik, serta mengevaluasi peran faktor fundamental dan non-fundamental dalam pembentukan tekanan nilai tukar. Selanjutnya, artikel ini juga menelaah dampak pelemahan Rupiah

terhadap perekonomian domestik dan efektivitas koordinasi kebijakan yang telah ditempuh oleh otoritas dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar.

Perkembangan Pasar Valas Global dan Regional

Kondisi ketidakpastian global yang tinggi seiring masih berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan harga minyak yang tinggi memicu ekspektasi inflasi sehingga suku bunga Amerika Serikat akan tetap tinggi dalam waktu yang lama (*higher for longer*). Hal ini mendukung indeks dolar AS (DXY) bertahan di level yang kuat, sehingga investor global kerap mempertahankan alokasi aset berbasis dolar AS (*safe-haven*). Kondisi tersebut tidak hanya memperkuat dolar AS, tetapi juga menekan mayoritas mata uang dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Nilai tukar negara-negara utama, seperti Yuan Cina (CNY), Euro (EUR), dan Yen Jepang (JPY), menunjukkan dinamika yang konvergen terhadap dolar AS.



Grafik 1. Persentase Depresiasi/Apresiasi Mata Uang Negara Utama (CNY, EUR, JPY) terhadap USD (ytd), periode Januari-Juli 2026

Sumber: Trading View, 2026

Berdasarkan Grafik 1, sepanjang periode Januari-Juli 2026, Yuan China (CNY) cenderung menguat secara bertahap terhadap USD dengan tren yang relatif stabil. Sementara Euro (EUR) mengalami pelemahan cukup dalam hingga Maret sebelum berbalik menguat pada April, volatilitas cenderung tinggi di tengah tekanan energi dan kebijakan moneter. Di sisi lain, Yen Jepang (JPY) juga menunjukkan tren pelemahan yang berkelanjutan terhadap USD, dengan fluktuasi yang cukup tajam, meskipun sempat mengalami *rebound* pada beberapa momentum.

Secara regional, tekanan pada *emerging market* terlihat lebih kontras, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Meskipun performa nilai tukar masing-masing negara juga dipengaruhi oleh kondisi domestiknya, tren umum menunjukkan pelemahan mata uang terjadi di sebagian besar negara.

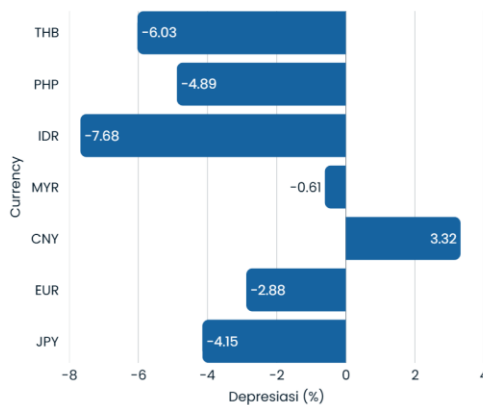


Grafik 2. Persentase Depresiasi/Apresiasi Mata Uang Negara ASEAN (THB, PHP, IDR, dan MYR) terhadap USD (ytd), periode Januari-Juli 2026

Sumber: Trading View, 2026

Sepanjang periode Januari-Juli 2026, Rupiah Indonesia (IDR) mencatat depresiasi paling dalam, diikuti Baht Thailand (THB) dan Peso Filipina (PHP). Sementara itu, Ringgit Malaysia (MYR) relatif lebih tahan terhadap tekanan global. Grafik berikut memperjelas perbandingan performa masing-masing mata uang terhadap dolar AS.

Perbandingan Depresiasi/Apresiasi Mata Uang terhadap USD
(Januari – Juli 2026)



*) Catatan: notasi (-) menunjukkan pelemahan nilai tukar terhadap USD

Grafik 3. Perbandingan Persentase Depresiasi/Apresiasi Mata Uang terhadap USD (ytd), periode Januari-Juli 2026

Sumber: Bloomberg; Trading View, 2026

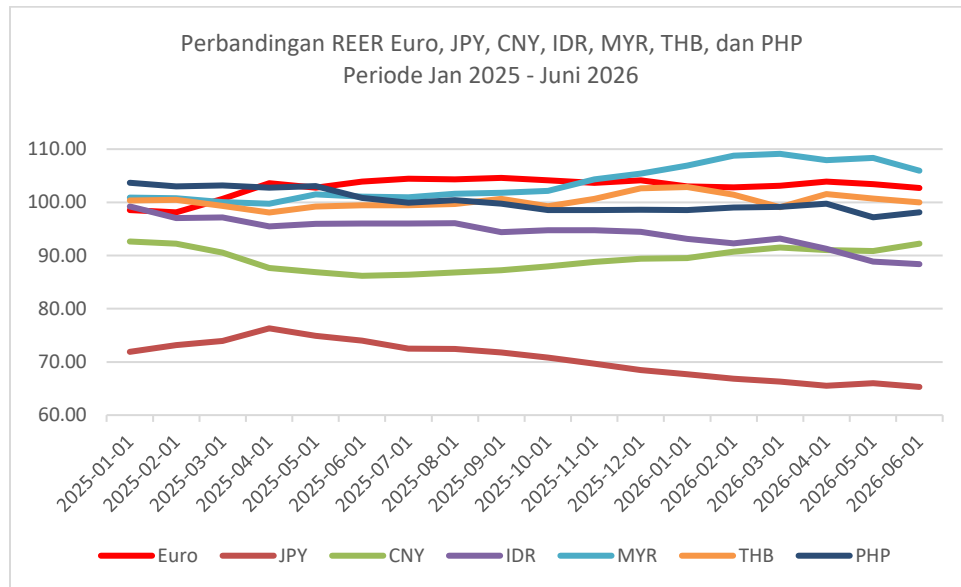
Di antara negara-negara tersebut, Rupiah Indonesia (IDR) mencatat depresiasi paling dalam sebesar 7,68% terhadap dolar AS, diikuti Baht Thailand sebesar 6,03% dan Peso Filipina (PHP) sebesar 4,89%. Sementara itu, Ringgit Malaysia (MYR) mencatat depresiasi sangat tipis sebesar 0,61% terhadap dolar AS. Di sisi mata uang utama, Yuan China (CNY) mencatat apresiasi sebesar 3,32% terhadap dolar AS, menjadi satu-satunya nilai tukar yang bertahan terhadap gejolak global di antara negara-negara yang diamati, sedangkan Euro (EUR) mencatat depresiasi moderat dan Yen Jepang (JPY) juga mencatat depresiasi, hampir menyamai Peso Filipina (PHP). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tekanan global hampir memengaruhi seluruh wilayah, tingkat kerentanan setiap negara dalam merespons tekanan tersebut menunjukkan hasil yang heterogen. Rupiah melemah lebih dalam dibandingkan negara-negara yang ada di kawasan maupun negara-negara utama, menunjukkan adanya indikasi kerentanan domestik yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, di samping faktor eksternal yang dominan.



Grafik 4. Persentase Depresiasi Rupiah terhadap USD (ytd), periode Januari-Juli 2026

Sumber: Trading View, 2026

Terlihat tren pelemahan Rupiah terhadap USD yang cukup konsisten pada Grafik 4 di atas, dengan Rupiah bergerak dari level Rp16.700 hingga menyentuh Rp17.968 pada akhir periode, setelah sebelumnya sempat menyentuh level psikologis Rp18.100/USD pada awal Juni 2026. Pelemahan ini mencapai sekitar 6,5-8,0%, dengan akselerasi yang lebih terlihat pada Maret–Juni seiring penguatan dolar AS secara global.



Grafik 5. Perbandingan REER Euro, JPY, CNY, IDR, MYR, THB, dan PHP Periode Jan 2025 – Jun 2026

Sumber: FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis), Bank of International Settlements (BIS), 2026

Selain ditinjau berdasarkan konteks pergerakan nilai tukar nominal, Grafik 5 di atas menunjukkan tren pelemahan nilai tukar beberapa negara dalam konteks riil (*Real Effective Exchange Rate* (REER)). Posisi REER memberikan gambaran mengenai daya saing eksternal suatu negara setelah memperhitungkan perubahan nilai tukar nominal, perbedaan tingkat harga (inflasi), serta bobot perdagangan negara-negara terkait dengan mitra dagang utamanya. Dari beberapa negara yang diamati, Rupiah (IDR) dan Yen (JPY) menunjukkan tren pelemahan REER yang konsisten

dari tahun 2025 hingga Juni 2026. Sebaliknya, Ringgit (MYR) dan Yuan (CNY) cenderung menunjukkan tren peningkatan. Sedangkan Euro (EUR), Baht (THB), dan Peso (PHP) menunjukkan tren yang lebih stabil. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap Rupiah tidak hanya tercermin pada pelemahan nilai tukar nominal, tetapi juga konsisten dengan pelemahan nilai tukar riil selama periode pengamatan.

Analisis Faktor Global dan Domestik yang Mendorong Pelemahan Rupiah

Faktor Global

Pelemahan Rupiah yang terjadi saat ini tidak terlepas dari tekanan eksternal yang cukup kuat. Tekanan tersebut terutama berasal dari eskalasi geopolitik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia, ekspektasi suku bunga tinggi di Amerika Serikat, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang menekan perdagangan internasional.

Tabel 1. Identifikasi Faktor Global yang Mendorong Pelemahan Rupiah

No	Variabel Shock	Penyebab	Transmisi	Implikasi Ekonomi
1	Geopolitik Timur Tengah	Isu keamanan regional dan politik dominasi AS yang tidak diterima oleh Iran semakin meningkat ditambah ancaman gangguan Selat Hormuz	Eskalasi konflik AS–Israel–Iran sejak akhir Februari hingga saat ini, ditambah ancaman gangguan Selat Hormuz meningkatkan ketidakpastian dan memicu <i>risk off</i> global.	1. Pasar keuangan 2. Neraca Pembayaran 3. Fiskal 4. Inflasi 5. Ekspektasi, Sentimen, dan Spekulasi
2	Lonjakan Harga Minyak Dunia	Geopolitik Timur Tengah	• Jalur Neraca Pembayaran: Harga impor energi meningkat sehingga permintaan terhadap USD untuk membiayai impor energi meningkat • Jalur Fiskal: Meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi • Jalur Inflasi: Kenaikan biaya logistik yang memicu efek berantai ke sektor riil (kenaikan biaya produksi)	
3	Penguatan Dolar AS & Inflasi Global	• Geopolitik Timur Tengah • Kenaikan harga energi • Kebijakan The Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi (<i>higher for longer</i>)	• Jalur Pasar Keuangan: Selisih imbal hasil aset AS dan Indonesia menyempit • Jalur Neraca Pembayaran: Biaya impor barang meningkat sehingga permintaan USD untuk membiayai impor barang juga ikut meningkat • Jalur fiskal: Biaya pembayaran pokok dan bunga ULN pemerintah dan swasta membengkak • Jalur Ekspektasi, Sentimen, & Spekulasi: Ekspektasi suku bunga global akan <i>higher for longer</i>, memicu flight to safety pada aset safe haven.	
4	Pertumbuhan	• Dinamika kondisi	• Jalur Neraca Pembayaran:	

ekonomi negara mitra dagang melambat & adanya hambatan perdagangan internasional <i>*menggunakan asumsi</i>	fundamental ekonomi negara terkait - Adanya fragmentasi perdagangan - Kebijakan tarif AS yang menekan volume perdagangan internasional	Volume permintaan ekspor dari Indonesia melemah Jalur fiskal: Pendapatan negara dari sektor eksternal menurun (PNBP, PPN, dst)	
---	--	---	--

Sumber: IES, 2026

Berdasarkan Tabel 1, tekanan global terhadap Rupiah berasal dari empat *shock* utama, yaitu eskalasi geopolitik di Timur Tengah, lonjakan harga minyak dunia, penguatan dolar AS dan inflasi global, serta perlambatan ekonomi negara mitra dagang dan hambatan perdagangan internasional. Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, seluruh *shock* tersebut pada akhirnya ditransmisikan melalui empat jalur utama, yaitu sektor eksternal (neraca pembayaran), fiskal, inflasi, serta pasar keuangan. Melalui jalur-jalur tersebut, tekanan global memengaruhi keseimbangan *supply-demand* valuta asing, meningkatkan ketidakpastian pasar, dan memperbesar tekanan depresiasi terhadap Rupiah.

1. Eskalasi Geopolitik Timur Tengah

Meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang terjadi saat ini semakin diperparah oleh adanya hambatan pada jalur logistik laut global, khususnya gangguan pada Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur distribusi minyak mentah terpenting di dunia. Kondisi ini mendorong investor global untuk mengurangi eksposur pada aset berisiko (*risk-off sentiment*) dan meningkatkan preferensi terhadap aset *safe haven* seperti dolar AS dan US Treasury. Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, perubahan perilaku investor tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan di pasar keuangan. Ketika permintaan terhadap aset berdenominasi dolar AS meningkat, nilai tukar mata uang domestik cenderung mengalami tekanan. Dengan demikian, eskalasi geopolitik Timur Tengah tidak hanya menjadi sumber ketidakpastian global, tetapi juga menjadi pemicu awal berbagai *shock* ekonomi lainnya yang pada akhirnya menekan nilai tukar Rupiah.

2. Lonjakan Harga Minyak Dunia

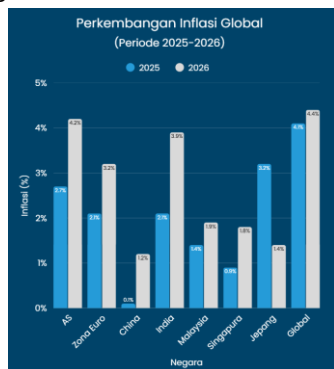


Grafik 6. Perkembangan Harga Minyak Dunia, periode 2025-2026

Sumber: Trading Economics

Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah turut meningkatkan harga minyak mentah dunia akibat meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global, di mana peningkatannya lebih terlihat pada periode akhir Februari hingga saat ini. Hal tersebut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia, termasuk Indonesian Crude Price (ICP) hingga menyentuh 117,31 USD/barel pada April 2026, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar 70 USD/barel. Bagi Indonesia yang masih berstatus sebagai *net importer* energi, kenaikan harga minyak ini menghambat perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur transmisi utama, yaitu jalur neraca pembayaran, fiskal, dan inflasi. Pada jalur neraca pembayaran, kenaikan harga minyak meningkatkan biaya impor energi sehingga kebutuhan dolar AS untuk pembayaran impor energi ikut meningkat. Pada jalur fiskal, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk subsidi dan kompensasi energi guna menjaga daya beli masyarakat, tercermin dari realisasi pada April 2026 mencapai Rp153,1 triliun (34,2% terhadap APBN). Sedangkan realisasi PNBP SDA Migas pada Januari-April 2026 hanya tumbuh 3,9% yoy menjadi Rp83,1 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp80 triliun. Hal ini mencerminkan besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi akibat kenaikan harga minyak global mulai membebani APBN, terutama jika tidak diimbangi dengan penerimaan pajak yang kuat. Selain itu, kenaikan harga minyak juga meningkatkan tekanan terhadap biaya logistik dan bahan baku yang memicu tekanan inflasi. Pada saat yang sama, tekanan terhadap sektor eksternal, fiskal, dan kenaikan inflasi impor secara kumulatif memberikan tekanan depresiasi yang kuat pada nilai tukar Rupiah.

3. Penguatan Dolar AS dan Inflasi Global



Grafik 7. Perkembangan Inflasi Global, periode 2025-2026

Sumber: IMF & Trading Economics, Mei 2026



Grafik 8. Perkembangan Nilai Tukar Dolar AS (DXY) Periode Aug 2025-Juli 2026

Sumber: TradingView



Grafik 9. Perkembangan Yield Obligasi AS Tenor 10, 5, dan 1 Tahun Periode Aug 2025-Juli 2026

Sumber: TradingView

Sementara itu, tekanan global juga berasal dari meningkatnya inflasi global dan menguatnya nilai tukar dolar AS.

Berdasarkan data di atas, inflasi global pada 2026 cenderung lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, terutama di Amerika Serikat, India, Jepang, dan beberapa negara Asia lainnya. Kenaikan inflasi tersebut mendorong The Fed mempertahankan suku bunga pada level tinggi lebih lama (*higher for longer*). Kondisi ini meningkatkan imbal hasil (yield) aset keuangan AS dan memperkuat indeks dolar AS (DXY). Di saat yang sama, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut mendorong kenaikan harga energi global dan memperkuat permintaan terhadap aset *safe haven* berdenominasi dolar AS. Melalui jalur keuangan, tingginya suku bunga dan yield aset AS menyebabkan aset keuangan AS menjadi lebih menarik dibanding negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyempitan selisih imbal hasil (*yield spread*) antara aset AS dan Indonesia ini mendorong aliran modal keluar (*capital outflow*) dan meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Melalui jalur neraca pembayaran, kenaikan harga energi dan biaya impor memperbesar kebutuhan devisa untuk pembayaran impor serta meningkatkan risiko inflasi impor. Sementara itu, dari sisi fiskal, penguatan dolar AS meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri pemerintah dan semakin meningkatkan kebutuhan valas. Kombinasi tekanan melalui ketiga jalur tersebut berpotensi memperbesar volatilitas pasar keuangan domestik dan memperlemah nilai tukar rupiah.

4. Perlambatan Ekonomi Negara Mitra Dagang dan Hambatan Perdagangan Internasional

Guncangan terakhir pada sektor eksternal datang dari melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia (seperti China, AS, India, dst.) serta adanya fenomena fragmentasi perdagangan global.

Ketidakefisienan rantai pasok akibat kebijakan tarif proteksionisme AS dan pembagian blok ekonomi dunia menjadi akar penyebab lesunya aktivitas perdagangan internasional. Bagi Indonesia, kondisi ini ditransmisikan melalui jalur neraca pembayaran akibat anjloknya volume permintaan terhadap komoditas ekspor nasional, yang diperparah oleh jatuhnya harga komoditas andalan Indonesia di pasar dunia. Di sisi fiskal, penurunan aktivitas ekspor ini juga menggerus pendapatan negara dari sektor eksternal, seperti setoran PPh Badan eksportir, PPN ekspor, Bea Keluar, hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor sumber daya alam. Pada akhirnya, rantai guncangan ini membawa implikasi akhir berupa penyusutan ruang gerak APBN, tekanan berat pada industri manufaktur lokal yang harus menghadapi penurunan pangsa pasar di ranah global, serta perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional (PDB). Di sisi lain, anjloknya kinerja ekspor ini menyebabkan pasokan valuta asing (dolar AS) yang masuk ke dalam negeri menjadi berkurang, sehingga memicu pelebaran defisit transaksi berjalan yang secara langsung memukul nilai tukar Rupiah hingga terdepresiasi lebih dalam.



Grafik 10. Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang Indonesia, periode 2025-2026

Sumber: IMF, 2026

Secara keseluruhan, berbagai *shock* global tersebut bekerja melalui mekanisme yang serupa, yaitu meningkatkan permintaan terhadap dolar AS dan/atau mengurangi pasokan devisa yang masuk ke dalam negeri. Kondisi tersebut menyebabkan keseimbangan *supply* dan *demand* valuta asing menjadi terganggu, sehingga meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Namun demikian, mengingat sebagian besar negara juga menghadapi lingkungan global yang relatif sama, pelemahan Rupiah yang lebih dalam dibandingkan beberapa negara kawasan mengindikasikan bahwa terdapat faktor domestik yang turut memperbesar sensitivitas Rupiah terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor domestik menjadi penting untuk menjelaskan akar penyebab pelemahan Rupiah secara lebih komprehensif.

Faktor Domestik

Di samping tekanan global, pelemahan Rupiah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik yang didominasi oleh tingginya kebutuhan valas untuk berbagai pembiayaan dan masih tingginya ketergantungan industri strategis Indonesia terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut tercermin dari variabel-variabel *shock* berikut.

Tabel 2. Identifikasi Faktor Domestik yang Mendorong Pelemahan Rupiah

No	Variabel <i>Shock</i>	Penyebab	Transmisi	Implikasi Ekonomi
1	Tekanan Fiskal yang Meningkat	Defisit APBN yang melebar (0,64% terhadap PDB) akibat kebutuhan pembiayaan yang besar (realisasi belanja negara Rp1.082,8T pada April 2026), sementara penerimaan perpajakan belum optimal (sebesar Rp746,9T pada April 2026).	- Jalur Fiskal: Banyaknya pembiayaan oleh pemerintah dalam jumlah besar (subsidi dan kompensasi energi, program prioritas nasional, belanja K/L, dan berbagai stimulus lainnya) turut menekan APBN dan ruang gerak fiskal - Jalur Pasar Keuangan: Pemerintah menerbitkan lebih banyak SBN di pasar primer untuk menutup defisit. Meningkatnya suplai SBN di pasar obligasi mendorong kenaikan yield SBN. - Jalur Ekspektasi, Sentimen, & Spekulasi: Meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas kebijakan dan keberlanjutan fiskal.	- Pasar keuangan - Neraca Pembayaran - Fiskal - Inflasi - Ekspektasi, Sentimen, dan Spekulasi
2	Ketergantungan Tinggi pada <i>International Trade</i>	Struktur ekonomi yang masih bergantung pada impor energi, bahan kimia, dan barang modal	- Jalur Neraca Pembayaran: Tingginya impor migas dan bahan baku meningkatkan kebutuhan valuta asing untuk transaksi perdagangan internasional. - Jalur Inflasi: Kenaikan biaya impor meningkatkan biaya produksi dan harga barang domestik.	
3	Utang Luar Negeri yang Meningkat	Kewajiban pembayaran pokok dan bunga ULN yang jatuh tempo (terutama ULN swasta dan BUMN). Tercermin dari posisi ULN pada akhir Maret 2026: 433,3 miliar USD (naik dari 429,8 miliar USD pada tahun lalu) (SULNI, Mei 2026).	- Jalur Neraca Pembayaran: Permintaan terhadap USD di dalam negeri meningkat untuk pembayaran pokok dan bunga utang LN (<i>debt servicing</i>) - Jalur Pasar Keuangan: Likuiditas valas mengetat di sektor perbankan domestik akibat penarikan dana valas oleh korporasi	

			Jalur Ekspektasi, Sentimen, & Spekulasi: Meningkatnya <i>sovereign risk</i> yang membuat investor meminta <i>risk premium</i> lebih tinggi.	
--	--	--	---	--

Sumber: IES, 2026

Faktor-faktor yang telah dipetakan pada tabel di atas, terutama berkaitan dengan kondisi fiskal, struktur perdagangan yang masih bergantung pada impor, serta meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri, turut memengaruhi keseimbangan *supply* dan *demand* valuta asing secara langsung sehingga turut memperbesar tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

1) Tekanan Fiskal yang Meningkat

Di tingkat domestik, pelemahan terhadap Rupiah didorong oleh meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal. Tekanan tersebut muncul seiring meningkatnya defisit fiskal akibat besarnya kebutuhan pembiayaan yang tidak diikuti dengan penerimaan pajak yang optimal. Realisasi pada Juli 2026, defisit APBN mencapai 0,76% terhadap PDB, di mana penerimaan negara menyumbang angka sebesar Rp1.459,4 triliun atau 46,3% terhadap APBN, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656 triliun atau 43,1% terhadap APBN, didorong oleh akselerasi belanja K/L (43,6% terhadap APBN), termasuk di dalamnya belanja pegawai, pelaksanaan program prioritas pemerintah, dan penyaluran bansos, serta belanja non-K/L (39% terhadap APBN), seperti pembayaran dana pensiun serta pemberian subsidi dan kompensasi energi. Melebarnya defisit anggaran pada awal tahun ini direspons oleh pemerintah melalui akselerasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer demi mengamankan likuiditas kas negara. Kondisi ini mendorong kenaikan *yield* SBN acuan ke level yang lebih tinggi. Dalam kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi, tekanan fiskal yang meningkat berpotensi menurunkan kepercayaan pasar, sehingga memicu arus modal keluar serta menambah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

2) Ketergantungan Tinggi pada *International Trade*

Di bawah ini (lihat Tabel 3), sejumlah industri strategis nasional masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bahan baku, komponen, dan barang modal impor. Pada industri otomotif, beberapa komponen utama masih diperoleh melalui impor dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi tersebut tercermin dari defisit perdagangan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang secara konsisten terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pola yang sama juga terlihat pada industri farmasi, kimia, dan obat tradisional yang masih mengimpor sekitar 90–95% bahan baku obat (BBO). Sementara industri elektronika masih memiliki kandungan impor komponen yang relatif tinggi, yaitu sebesar 94,82%. Di sektor tekstil dan sandang lainnya, termasuk di dalamnya alas kaki, juga masih banyak dipenuhi melalui impor, yaitu sebesar 15%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan dolar AS domestik tidak hanya berasal dari impor energi maupun pembayaran utang luar negeri semata, tetapi juga dari kebutuhan sektor riil untuk memperoleh input produksi yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri di dalam negeri. Dengan demikian, aktivitas produksi dalam negeri juga turut menciptakan permintaan dolar AS yang bersifat struktural. Ketika terjadi volatilitas nilai tukar, biaya pengadaan bahan baku menjadi lebih mahal. Sedangkan kebutuhan dolar AS oleh sektor industri tetap harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan produksi. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan valuta asing cenderung tetap tinggi, sehingga memperbesar tekanan terhadap keseimbangan *supply* dan *demand* valas domestik serta meningkatkan kerentanan Rupiah terhadap gejolak eksternal.

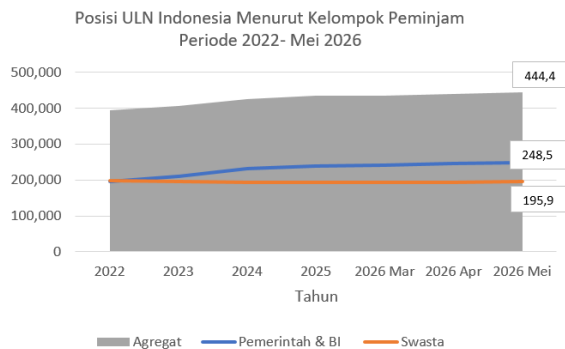
Tabel 3. Import Content Industri Strategis Indonesia

Industri	Kode Produk	Import Content (%)	Sumber
----------	-------------	--------------------	--------

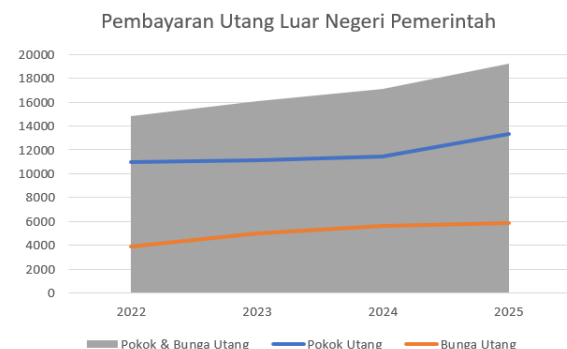
Elektronika	121-130	94.82	Tabel I-O BPS 185 Produk
Farmasi, Kimia, dan Obat Tradisional	96-106	95	Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia , 2025
Transportasi dan Otomotif	107, 131-136	55.65	Gaikindo ; Laporan TKDN, 2026
Tekstil dan sandang lainnya	77-85	15.33	Tabel I-O BPS 185 Produk

3) Utang Luar Negeri (ULN) yang Meningkat

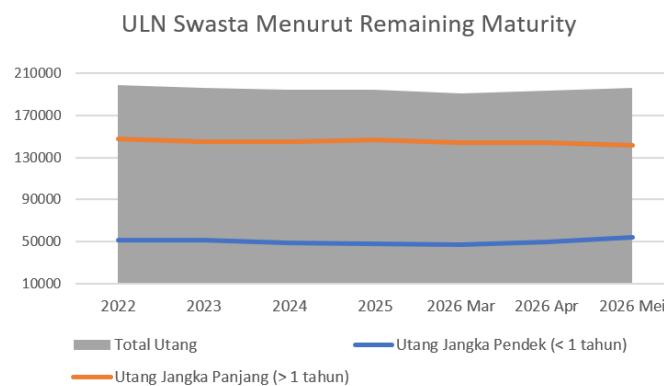
Selain itu, beban utang luar negeri (ULN) Indonesia juga terus meningkat, didorong oleh utang pemerintah dan bank sentral, sementara utang sektor swasta relatif stabil di level yang tinggi. Posisi ULN Indonesia per akhir Mei 2026 secara kumulatif mencapai 444,4 miliar USD, naik hingga 9 miliar USD dibandingkan tahun sebelumnya. Kewajiban pembayaran pokok dan bunga ULN yang jatuh tempo juga meningkatkan kebutuhan dolar AS di pasar domestik untuk *debt servicing*. Di tengah kondisi pelemahan Rupiah, kenaikan kebutuhan valas untuk pembayaran utang tersebut turut memperbesar *net demand* dolar AS yang dapat menekan likuiditas valas di pasar domestik, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.



Grafik 11. Posisi ULN Indonesia Menurut Kelompok Peminjam (Miliar USD)
Sumber: SULNI, Juli 2026



Grafik 12. Pembayaran ULN Indonesia Periode 2022-2025 (Miliar USD)
Sumber: SULNI, Juli 2026



Grafik 13. ULN Swasta berdasarkan Jangka Waktu Sisa (Miliar USD)
Sumber: SULNI, Juli 2026

Posisi Nilai Tukar Rupiah dalam Perspektif Fundamental

Secara fundamental, tekanan rupiah berasal dari memburuknya keseimbangan eksternal, yang ditunjukkan oleh defisit pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Setelah mencatat surplus pada tahun 2023-2024, NPI berbalik mengalami defisit pada 2025 (USD 7,8 miliar) dan semakin melebar pada triwulan 1 2026 (USD 9,1 miliar). Hal ini menandakan bahwa tekanan pada sisi eksternal telah terjadi sebelum meningkatnya *shock* global. Defisit yang terjadi pada triwulan 1 2026 ini dipengaruhi oleh defisit pada transaksi modal dan finansial yang lebih besar dibandingkan transaksi berjalan. Transaksi berjalan mencatat defisit USD 4,0 miliar (1,1 persen dari PDB), setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit USD 2,5 miliar (0,7 persen dari PDB). Defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh besarnya defisit jasa dan pendapatan primer yang mencerminkan pembayaran bunga utang luar negeri serta repatriasi dividen kepada investor asing. Sedangkan transaksi modal dan finansial pada triwulan I 2026 mencatat defisit USD 4,9 miliar, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat surplus USD 9,0 miliar. Defisit tersebut dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo serta penempatan aset, kas, dan simpanan lainnya di luar negeri. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan valuta asing domestik yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh aliran devisa yang masuk ke dalam negeri. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor fundamental yang berkontribusi terhadap pelemahan rupiah, terutama ketika dikombinasikan dengan penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global. Sementara itu, cadangan devisa tercatat menurun pada triwulan I 2026, namun level tersebut masih tergolong memadai untuk mendukung stabilitas eksternal. Di mana cadangan devisa tersebut setara dengan 5,79 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah, masih memenuhi standar kecukupan internasional, yaitu 3 bulan impor.

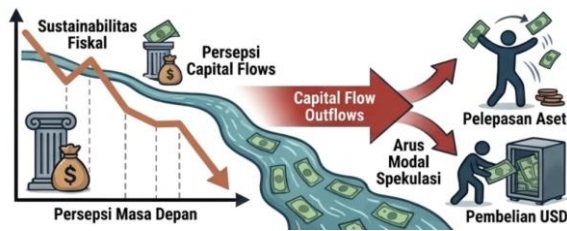
Tabel 4. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia Periode 2023-2026 (miliar USD)

Indikator	2023	2024	2025	2026 (Q1)
Transaksi Berjalan	-2,04	-8,58	-1,52	-4,01
Transaksi Modal dan Finansial	9,87	17,98	-3,66	-4,92
Neraca Keseluruhan	6,30	7,21	-7,84	-9,14
Posisi Cadangan Devisa	146,38	155,72	156,47	148,15
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran ULN Pemerintah	6.51	6.47	6.22	5.79

Sumber: SEKI, April 2026

Indikator Non-fundamental dalam Pelemahan Rupiah

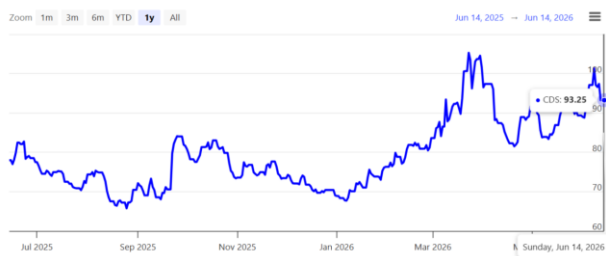




*) Ilustrasi

Selain itu, depresiasi Rupiah di awal 2026 juga dipengaruhi oleh faktor non-fundamental, seperti sentimen pasar, persepsi risiko investor, dan dinamika arus modal jangka pendek. Peningkatan persepsi risiko terhadap Indonesia tercermin dari peningkatan *uncertainty premium* yang ditunjukkan oleh kenaikan *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia. CDS merupakan indikator yang digunakan untuk menilai risiko kredit terkait utang luar negeri suatu negara. Kenaikan CDS menunjukkan bahwa pasar menilai risiko investasi meningkat dibandingkan sebelumnya, sehingga investor meminta kompensasi yang lebih besar untuk memegang aset berdenominasi Rupiah.

CDS Indonesia per Juni 2026 tercatat sebesar 93,25 poin, meningkat signifikan dibandingkan akhir 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap prospek fiskal, stabilitas pasar keuangan, dan arah kebijakan ekonomi domestik. Peningkatan persepsi risiko ini juga tercermin pada kecenderungan kenaikan yield SBN serta revisi outlook kredit Indonesia oleh Moody's dari stabil menjadi negatif yang semakin memperkuat kehati-hatian pelaku pasar. Penurunan kepercayaan investor tidak hanya memengaruhi keputusan investasi portofolio, tetapi juga mendorong pengurangan *holding period* aset Rupiah, peningkatan aktivitas lindung nilai (*hedging*) korporasi, serta potensi *domestic capital flight*. Ketika persepsi risiko meningkat, investor cenderung melakukan *repricing* terhadap aset domestik dan mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman (*safe haven assets*). Akibatnya, tekanan terhadap Rupiah muncul lebih cepat dibandingkan perubahan fundamental ekonomi. Kondisi tersebut tercermin dari *net outflow* pasar aset domestik yang mencapai sekitar USD 0,8 miliar pada triwulan I 2026. Sejalan dengan itu, investor asing juga secara konsisten melakukan *net selling* di pasar keuangan Indonesia sejak awal tahun, dengan tekanan jual mencapai puncaknya pada akhir Maret 2026. Perkembangan ini menunjukkan bahwa faktor sentimen dan persepsi risiko memiliki peran penting dalam memperdalam tekanan terhadap nilai tukar Rupiah di luar faktor fundamental ekonomi.



Grafik 14. Tren Historis CDS Indonesia, periode 2025-2026

Sumber: World Government Bonds



Grafik 15. *Net Selling* Investor Asing di Pasar Saham, Data Mingguan Januari-Mei 2026

Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah

Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, investor cenderung melakukan *flight to safety* dengan memindahkan dana dari aset negara berkembang, seperti Indonesia menuju aset *safe-haven* seperti US Treasury dan instrumen berbasis dolar AS. Perpindahan portofolio tersebut mendorong konversi dana investasi dari Rupiah ke dolar AS, sehingga meningkatkan permintaan valas dan memperbesar tekanan depresiasi Rupiah.

Asumsi Makroekonomi APBN 2026

Tabel 5. Asumsi Makroekonomi APBN 2026

Indikator	Asumsi Makro 2026	Realisasi (Awal 2026)	Asumsi Makro 2027 (Pidato Presiden)
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,4% (RAPBN 2026)	5,61% yoy (Q1 2026)	5,8%-6,5%
Inflasi (% yoy)	2,5%+-1% (RAPBN 2026)	3,34% yoy (Juni 2026)	1,5-3,5%
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.500 (RAPBN 2026)	17.968 (Juli 2026)	16.800-17.500
Harga Minyak (USD/barel)	70 (RAPBN 2026)	93 (<i>Brent Crude Oil</i> , Juli 2026)	70-95
Defisit APBN (% terhadap PDB)	(2,48%) ~ Rp638,8 Triliun (RAPBN 2026)	(0,76% PDB) ~ Rp164,4 Triliun (Juli 2026)	1,80-2,40%

Sumber: RAPBN 2026; BPS; Pidato Presiden, Juli 2026

Pemerintah menyusun APBN 2026 dengan asumsi makroekonomi yang cukup optimis, dengan harapan dapat menjadi acuan kebijakan fiskal yang prudent. Namun, realisasi di awal tahun menunjukkan adanya deviasi yang cukup signifikan pada beberapa variabel utama, terutama yang berhubungan langsung dengan nilai tukar Rupiah. Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar sebesar Rp16.500/USD dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 USD/barel. Namun, hingga Juli 2026, Rupiah telah melemah hingga menyentuh Rp17.968/USD, sementara realisasi harga minyak dunia pada Juli 2026 melonjak mencapai 93 USD/barel. Deviasi antara asumsi dan realisasi tersebut meningkatkan tekanan terhadap APBN melalui kenaikan biaya impor energi, membengkaknya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, serta meningkatnya biaya pembiayaan pemerintah. Sementara itu, dalam Pidato Presiden terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, pemerintah mulai menggeser batas atas nilai tukar ke arah yang lebih realistis, yaitu Rp16.800-Rp17.500/USD, serta menaikkan rentang asumsi harga minyak ke level 70-95 USD/barel untuk mengantisipasi kelanjutan guncangan di sektor energi.

Koordinasi Kebijakan Antarotoritas dalam Menjaga Stabilitas Rupiah

1. Bank Indonesia

Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan stabilisasi melalui optimalisasi instrumen moneter, intervensi di pasar valas, serta penguatan pengawasan transaksi valuta asing.

Tabel 7. Kebijakan Bank Indonesia dalam Menstabilkan Rupiah

Kebijakan yang Sudah/Akan Ditempuh	Komponen	Ekspektasi Hasil
Optimalisasi Instrumen Kebijakan dan Operasi Moneter	- Kebijakan suku bunga: BI Rate naik 100 bps sejak Mei 2026, berada di level 5,75% hingga Juli 2026. - Ekspansi likuiditas pasar keuangan melalui operasi moneter ($\pm$Rp1.000 triliun hingga akhir Juni 2026). - Intervensi pada pasar valas: - Meningkatkan intensitas intervensi di pasar spot, DNDF, serta pelanggaran transaksi NDF <i>offshore</i> dengan melibatkan bank domestik untuk memperkuat likuiditas valas	- Menjaga inflasi terkendali dan stabilitas pasar keuangan. - Mengurangi volatilitas pada rupiah dan memperkuat likuiditas pasar uang dan valas - Menarik <i>inflow</i> portofolio asing, dan menjaga daya tarik aset domestik

	○ Membeli SBN di pasar sekunder melalui koordinasi dengan kemenkeu untuk menjaga likuiditas & stabilitas pasar ○ Pemberian insentif berupa peningkatan tingkat swap lindung nilai (<i>hedging swap</i>) bagi investor asing sebesar 12,5% dari 10% dan perluasan insentif bagi DNDF Jual lindung nilai sebesar 15%. ● Instrumen Operasi Moneter ○ Penguatan struktur suku bunga instrumen moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI ○ Pelonggaran likuiditas perbankan melalui sinergi KSSK	
Penetapan Aturan Transaksi Valas dan Pengawasan Korporasi/Perbankan	● <i>Threshold</i> beli valas tunai diturunkan menjadi 10 ribu USD/bulan mulai Juli 2026. ● <i>Threshold</i> DNDF/forward/swap dinaikkan pada bank-bank tertentu untuk mengurangi spekulasi ● Penguatan pengawasan transaksi pembelian valas terhadap bank/perusahaan yang melakukan transaksi valas dalam jumlah tinggi ● Penyesuaian <i>threshold</i> dokumen pendukung transfer dana ke luar negeri (LLD) menjadi setara di atas USD25.000, berlaku mulai Juli 2026.	● Mengurangi permintaan valas spekulatif ● Menjaga efisiensi penggunaan devisa domestik ● Memperkuat stabilitas pasar valas
Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA)	● Penguatan implementasi Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 ● Perluasan instrumen operasi moneter valas melalui transaksi spot dan swap CNH-Rupiah ● Perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan Local Currency Transaction (LCT) dan QRIS <i>cross-border</i> ● Relaksasi terbatas transaksi NDF luar negeri bagi dealer utama tertentu untuk mendukung stabilitas pasar	● Memperdalam pasar keuangan domestik ● Mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam jangka panjang ● Memperkuat ketahanan struktural pasar valas domestik
Penguatan Koordinasi & Sinergi Kebijakan Antarotoritas	● Koordinasi BI, Kemenkeu, OJK, dan LPS dalam asesmen risiko dan stabilitas sistem keuangan ● Sinkronisasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas Rupiah dan pasar keuangan	● Menjaga efektivitas transmisi kebijakan ● Memperkuat kepercayaan pasar dan stabilitas sistem keuangan ● Mengurangi risiko kebijakan yang berjalan parsial atau tidak sinkron
Penguatan Kerja Sama Keuangan Regional dan Internasional	● Penguatan koordinasi ASEAN+3 melalui AFMG+3 ● Dukungan penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) sebagai <i>regional financial safety-net</i> ● Penguatan kerja sama kebanksentralan dan stabilitas keuangan bilateral (BI dan Bank Negara Malaysia) dan regional.	● Memperluas akses likuiditas regional saat terjadi tekanan pasar ● Mendukung stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar dalam jangka menengah-panjang ● Memperkuat kepercayaan pasar terhadap ketahanan

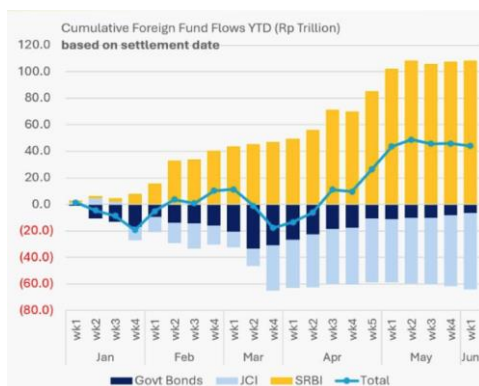
eksternal kawasan

Sumber: Pers Rilis Bank Indonesia & Kementerian Keuangan, Juli 2026

Sebagai respons terhadap tekanan terhadap Rupiah, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan moneter yang terintegrasi melalui penyesuaian BI Rate, optimalisasi instrumen moneter pro-market, serta strategi *triple intervention* di pasar spot, Non-Deliverable Forward (NDF), dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Bauran kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat likuiditas valas domestik, meningkatkan daya tarik aset berdenominasi Rupiah, serta memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan efektif. Berdasarkan perkembangan terkini, bauran kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif, di antaranya:

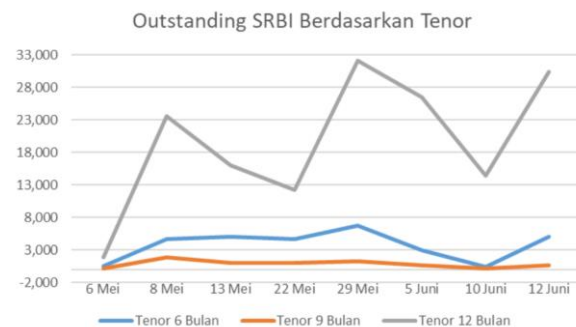
a. **Optimalisasi instrumen moneter berhasil meningkatkan daya tarik aset Rupiah**

Optimalisasi SRBI secara efektif berhasil menyerap kembali dana-dana asing yang keluar dari saham maupun obligasi. *Inflow* tercatat terus meningkat hingga menyentuh USD 5,5 miliar pada pertengahan Mei. Sementara itu, transaksi modal keluar juga berhasil diredam, tercermin dari *net sell* investor yang menurun. Pada lelang Mei 2026, mayoritas dana yang dimenangkan investor berada pada tenor 12 bulan, menunjukkan bahwa investor tidak hanya mencari keuntungan pada instrumen jangka pendek (6 dan 9 bulan), tetapi masih memiliki keyakinan terhadap stabilitas aset Rupiah dalam jangka menengah (12 bulan). Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas aset Rupiah dalam jangka menengah sekaligus mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen stabilisasi pasar keuangan.



Grafik 16. Arus Modal Asing pada Instrumen Utang Indonesia

Sumber: Dokumen Internal

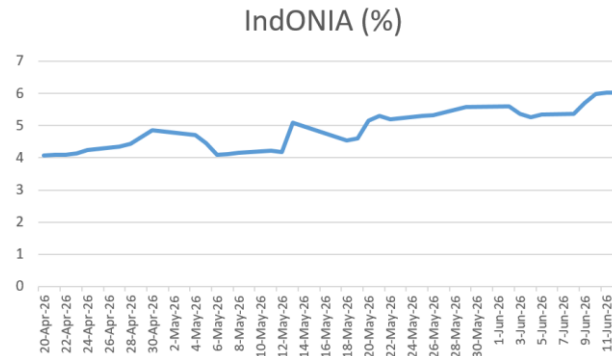


Grafik 17. Perkembangan *Outstanding* SRBI berdasarkan Tenor Periode Mei-Juni 2026

Sumber: Bank Indonesia

b. **Transmisi kebijakan moneter ke pasar uang berjalan efektif**

Pengetatan kebijakan moneter juga tercermin pada suku bunga overnight IndONIA yang menunjukkan tren meningkat dari kisaran 4% pada akhir April menjadi sekitar 5,5%-6% pada Juni 2026. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perubahan *stance* kebijakan Bank Indonesia berhasil diteruskan ke pasar uang antarbank, sehingga mendukung efektivitas pengelolaan likuiditas serta memperkuat transmisi kebijakan moneter.



Grafik 18. Perkembangan Suku Bunga Overnight IndONIA Periode April-Juni 2026

Sumber: Bank Indonesia

- c. **Likuiditas domestik tetap terjaga di tengah pengetatan moneter**
Di tengah kenaikan BI Rate dan optimalisasi operasi moneter, kondisi likuiditas domestik tetap menunjukkan ketahanan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan M0 sebesar 14,3% (yoy), M1 sebesar 13,6% (yoy), dan M2 sebesar 9,2% (yoy) pada April 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetatan moneter tidak mengganggu fungsi intermediasi sistem keuangan maupun ketersediaan likuiditas bagi aktivitas ekonomi.
- d. **Sentimen pasar mulai membaik seiring penguatan respons kebijakan**
Sentimen pasar menunjukkan perbaikan setelah Bank Indonesia memperkuat respons kebijakan melalui kenaikan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Perbaikan tersebut diikuti oleh penguatan IHSG sebesar 7,57% dan apresiasi Rupiah ke kisaran Rp17.900/USD dari level sebelumnya di atas Rp18.100/USD. Kondisi ini mengindikasikan mulai membaiknya persepsi pasar terhadap aset domestik serta meredanya tekanan jangka pendek di pasar keuangan.
- e. **Upaya lanjutan penguatan stance moneter**
Bank Indonesia juga melanjutkan sikap kebijakan moneter yang *pro-stability* melalui kenaikan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada RDG Juni 2026 dan tetap bertahan di level yang sama hingga Juli 2026. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, memperkuat daya tarik aset berdenominasi Rupiah di tengah ketidakpastian global, serta memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan ekspansi likuiditas melalui berbagai instrumen operasi moneter hingga Rp1.000 triliun pada akhir Juni agar tidak terjadi gejolak harga di pasar valas maupun di pasar uang. Upaya tersebut diikuti oleh aliran modal asing (*capital inflow*) ke instrumen portofolio SBN dan SRBI hingga mencapai 8,5 miliar dolar AS pada triwulan II 2026, yang kemudian berlanjut pada triwulan III 2026 (hingga 20 Juli 2026) terutama dari SBN yang mencatat *net inflows* sebesar 0,1 miliar dolar AS.

Secara keseluruhan, strategi yang dijalankan BI cukup efektif dalam jangka pendek melalui optimalisasi beragam instrumen serta dapat direspons segera oleh pasar, tetapi masih terdapat keterbatasan: (1) Kebijakan tersebut bersifat simptomatik, yaitu efektif menahan volatilitas sementara, tetapi belum mampu mengubah trajektori struktural selama faktor global (DXY kuat, harga minyak tinggi, geopolitik) dan domestik masih kuat. (2) Upaya tersebut juga cukup menguras cadangan devisa, sehingga ruang pelonggaran moneter (BI Rate) menjadi lebih terbatas. Tercermin dari penurunan cadangan devisa secara berturut-turut selama tiga bulan terakhir (148,15 miliar USD pada Maret, 146,2 miliar USD pada April, dan 144,9 miliar USD pada Mei 2026). Meskipun cadangan devisa dianggap masih memadai untuk membiayai pembayaran ULN dan impor selama lebih dari tiga bulan (sesuai dengan standar IMF), namun hal ini menunjukkan bahwa upaya stabilisasi nilai tukar membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga apabila tekanan Rupiah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka fundamental eksternal Indonesia akan semakin terganggu. Oleh karena itu, stabilisasi nilai tukar tetap memerlukan koordinasi yang erat antara

Bank Indonesia, pemerintah, OJK, dan KSSK agar efektivitas kebijakan dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Kementerian Keuangan

Berbeda dengan Bank Indonesia yang berfokus pada stabilisasi moneter dan nilai tukar, Kementerian Keuangan menitikberatkan kebijakan pada penguatan ketahanan fiskal dan menjaga keberlanjutan pembiayaan APBN. Hal ini dilakukan agar dapat mempertahankan kepercayaan investor terhadap kondisi fiskal domestik.

Tabel 8. Kebijakan Kementerian Keuangan dalam Pengendalian Fiskal dan Upaya Stabilisasi Rupiah

Kebijakan yang Sudah/Akan Ditempuh	Komponen	Ekspektasi Hasil
Optimalisasi penerimaan negara dan diversifikasi sumber pembiayaan	Percepatan pajak, optimalisasi PNBP migas, dan pengelolaan SBN tepat waktu. - Realisasi penerimaan pajak Juni 2026 Rp1.035,7 triliun, setara 44,1% terhadap APBN. - PNBP SDA 2026 Juni tumbuh 21,6% (yoy) atau setara 59% terhadap APBN. - Penerbitan 8 seri SBN ritel sepanjang 2026 dengan target Rp150–170 triliun - Penerbitan Panda Bond pada Juni 2026 untuk memperluas sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada pasar USD. - Rencana perubahan tata kelola ekspor komoditas SDA untuk dikelola oleh BUMN (PT Danantara Sumber Daya Indonesia).	Penguatan stabilitas fiskal dan memperluas basis investor
Pembelian Surat Berharga Negara	Pemerintah membeli SBN senilai Rp2,2T di pasar sekunder untuk menjaga harga obligasi. Intervensi ini dianggap telah menarik dana asing masuk sebesar Rp500 miliar dari pasar sekunder dan Rp1,2 T di pasar primer.	Penguatan stabilitas nilai tukar
Defisit dijaga di bawah 3% PDB	Target defisit direvisi ke kisaran 2,9% PDB (dari 2,68%) tetapi tetap di bawah batas UU	Menjaga disiplin fiskal dan efisiensi belanja
Penguatan APBN sebagai <i>shock absorber</i>	- Harga BBM bersubsidi (Pertalite, Solar, LPG) tetap sampai akhir 2026 meski ICP di atas 100/barel USD - Penyesuaian anggaran program MBG menjadi Rp268T dari sebelumnya Rp335T pada tahun 2026 sebagai upaya efisiensi anggaran. - Pemberian stimulus melalui subsidi bansos dan transportasi pada momentum musiman, subsidi energi, subsidi pupuk, KUR, dan stabilisasi pangan.	- Mengendalikan inflasi domestik dan menjaga daya beli masyarakat - Efisiensi dan <i>refocusing</i> anggaran untuk pembiayaan prioritas lainnya - Menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek
Penguatan Pasokan Devisa Domestik	- Kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA selama 12 bulan di perbankan domestik (Bank-bank Himbara) serta dapat mengonversi maksimal 50% devisa ke Rupiah (sebelumnya 100%), berlaku mulai 1 Juni 2026 - Optimalisasi DHE melalui penguatan tata kelola ekspor BUMN dan sentralisasi pengelolaan devisa hasil ekspor.	- Memperkuat likuiditas valas domestik - Menjaga keseimbangan <i>supply-demand</i> valas - Mengurangi tekanan struktural terhadap Rupiah

Penguatan Koordinasi & Sinergi Kebijakan Antarotoritas	• Koordinasi BI, Kemenkeu, OJK, dan LPS dalam asesmen risiko dan stabilitas sistem keuangan • Sinkronisasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas Rupiah dan pasar keuangan • Dukungan penuh terhadap intervensi valas BI melalui KSSK	• Menjaga efektivitas transmisi kebijakan • Memperkuat kepercayaan pasar dan stabilitas sistem keuangan • Mengurangi risiko kebijakan yang berjalan parsial atau tidak sinkron
--	---	--

Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Sebagai respons terhadap tekanan eksternal dan pelemahan Rupiah, Kementerian Keuangan mengarahkan kebijakan fiskal untuk menjaga disiplin APBN sekaligus menjalankan fungsi *shock absorber* perekonomian. Dalam konteks stabilitas nilai tukar, kebijakan fiskal tidak memengaruhi Rupiah secara langsung, tetapi terutama melalui pembentukan persepsi pasar terhadap kredibilitas fiskal, pengelolaan pembiayaan negara, serta penguatan ketahanan eksternal. Dalam konteks ini, disiplin APBN penting karena persepsi investor terhadap kredibilitas fiskal memengaruhi minat pada obligasi pemerintah dan aset domestik lain. Melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK dalam kerangka KSSK, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik sehingga membantu menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar, di mana efektivitasnya sebagaimana diuraikan berikut:

a. Persepsi Pasar terhadap Kredibilitas Fiskal

Kredibilitas APBN menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia. Realisasi anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran hingga akhir Juni 2026 secara umum masih mengikuti target. Namun, pasar juga mencermati kualitas belanja (perbedaan prioritas antara program baru seperti MBG dengan belanja dasar seperti pendidikan), *new emerging risk* yang semakin kompleks, serta perubahan struktur penerimaan PNBPN akibat pengalihan pengelolaan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari penilaian investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal dan keberlanjutan APBN dalam jangka menengah.

b. Penguatan Pasokan Devisa Domestik

Melalui PP Nomor 21 Tahun 2026, pemerintah memperkuat kewajiban retensi DHE SDA (100% untuk non-migas dan minimal 30% untuk migas) melalui penempatan di bank BUMN. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan likuiditas valas domestik dan memperkuat ketahanan ekonomi di sisi eksternal. Namun, mengingat implementasinya baru dimulai pada Juni 2026, efektivitas kebijakan tersebut terhadap stabilitas nilai tukar masih perlu dicermati. Di sisi lain, keleluasaan pengusaha dalam pengelolaan DHE menjadi kurang fleksibel. Kebijakan ini juga masih mengandung kelemahan, antara lain, kekhawatiran pelaku usaha terhadap konsistensi kebijakan dalam penempatan dana, sehingga implementasi perlu menyeimbangkan antara stabilitas nilai tukar dan kepentingan kelangsungan bisnis (*business continuity*).

c. Kepercayaan Investor di Pasar SBN

Yield SBN tenor 10 tahun berada di level 7,18% (*end of period*), dengan *bid-to-cover ratio* lelang yang solid (1,8x untuk SUN dan 2,6x untuk SBSN). Hingga awal Juni 2026, pasar SBN mencatat *inflow* sekitar Rp14,4 triliun. Meskipun *yield spread* terhadap US Treasury melebar akibat premi risiko global yang lebih tinggi, aset keuangan Indonesia dalam jangka pendek masih relatif diminati. Namun, *inflow* tersebut belum cukup kuat untuk sepenuhnya mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang dipengaruhi kombinasi faktor fundamental dan non-fundamental.



Grafik 19. Perkembangan Yield SBN 10Y dengan UST 10Y Periode 2025-2026

Sumber: Trading View, 2026

Secara keseluruhan, efektivitas penguatan kredibilitas fiskal dalam pengelolaan penerimaan dan pembiayaan pemerintah belum tentu sejalan dengan persepsi investor yang berdampak langsung terhadap volatilitas nilai tukar. Respons pasar terhadap instrumen fiskal, khususnya pasar SBN, dalam jangka pendek masih mampu menarik arus modal asing (*capital inflow*). Namun demikian, efektivitas transmisi kebijakan fiskal terhadap stabilitas Rupiah masih bersifat parsial karena tidak terlepas dari pengaruh faktor di luar fiskal, seperti ketidakpastian global, kondisi fundamental domestik, serta sentimen investor. Di sisi lain, kualitas belanja negara, keberlanjutan penerimaan negara (*revenue sustainability*), serta komunikasi dan implementasi sejumlah kebijakan baru masih terus dicermati oleh pelaku pasar. Begitu pula, sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor jasa keuangan perlu semakin diintensifkan untuk memperkuat efektivitas koordinasi kebijakan dalam menjaga stabilitas Rupiah.

3. Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 9. Kebijakan OJK Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pasar Modal

Kebijakan yang Sudah/Akan Ditempuh	Komponen	Ekspektasi Hasil
Penguatan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan	- Pemenuhan modal minimum Lembaga Jasa Keuangan (LJK), khususnya untuk bank KBMI 1 dengan meningkatkan modal minimum dari Rp3 triliun menjadi Rp6 triliun (masih menunggu pemberlakuan). - Kebijakan menjaga likuiditas dan intermediasi melalui POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Bank Umum dan POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>net stable fund ratio</i>) bagi Bank Umum	Meningkatkan ketahanan perbankan terhadap gejolak pasar keuangan, menjaga kepercayaan investor, serta mengurangi risiko <i>capital outflow</i> yang dapat memperbesar tekanan terhadap Rupiah.
Penguatan Infrastruktur Pengawasan dan Pelaporan	Pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, seperti <i>artificial intelligence</i> (AI) dan penyusunan Cetak Biru (<i>blueprint</i>) dan Suptech	Meningkatkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kredibilitas regulator di mata pelaku pasar dan investor.
Reformasi integritas pasar modal	Membentuk satgas reformasi integritas pasar modal dengan 8 rencana aksi percepatan yang terbagi ke dalam 4 klaster:	Meningkatkan kredibilitas dan integritas pasar modal Indonesia, memperluas basis investor

	1. Menaikkan batas minimum <i>free float</i> emiten menjadi 15 persen, meningkat dari 7,5 persen. Selain itu, bersama pemerintah, OJK dan SRO akan melakukan penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor, baik domestik maupun asing. 2. Transparansi atas <i>ultimate beneficial owner</i> dan keterbukaan afiliasi pemegang saham 3. Penguatan data kepemilikan saham dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global 4. Tata kelola dan <i>enforcement</i> melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia, memperkuat <i>enforcement</i> terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, penguatan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi dengan multi <i>stakeholder</i> untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.	domestik dan asing, serta mendukung penurunan risk premium yang melekat pada aset keuangan Indonesia.
--	--	---

Sumber: OJK, 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal agar tetap resilien di tengah meningkatnya tekanan eksternal. Melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan tata kelola sektor keuangan, OJK berupaya mempertahankan kepercayaan investor terhadap aset keuangan domestik sehingga volatilitas di pasar keuangan tidak semakin memperbesar tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Melalui kebijakan tersebut, efektivitas kebijakan yang telah ditempuh OJK perlu dicermati dampaknya:

1. Ketahanan Sektor Perbankan

Dampak volatilitas nilai tukar terhadap industri perbankan tercermin dari CAR yang berada di angka 23,97% pada April 2026, menurun dari posisi triwulan IV 2025 yaitu 25,8%. Sementara itu, NPL berada di angka 2,17% pada bulan yang sama, meningkat dari 2,05% pada triwulan IV 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbankan mulai mengalami tekanan pada kapasitas permodalan, disertai risiko kredit yang meningkat. Hal tersebut turut memengaruhi keyakinan investor terhadap ketahanan sistem keuangan domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

2. Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar

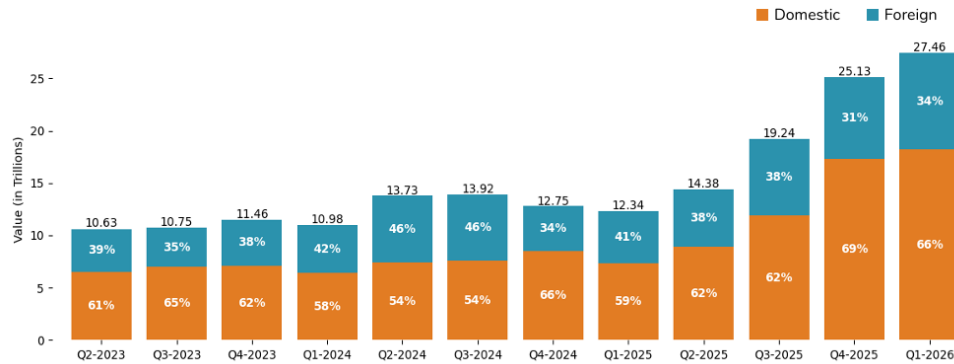
Berdasarkan data April 2026, kredit perbankan industri tercatat tumbuh tipis (9,9% yoy dari 9,63% pada triwulan IV 2025) dan DPK menurun (11,4% yoy dari 13,83% pada triwulan IV 2025), sementara rasio AL/DPK dan AL/NCD tercatat menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas likuiditas perbankan mulai mengalami tekanan di tengah gejolak pasar, pertumbuhan DPK yang melambat mengindikasikan adanya risiko likuiditas dan risiko pasar yang meningkat yang memengaruhi sentimen terhadap aset perbankan.

3. Struktur Pasar Modal

Pasar modal Indonesia sepanjang 2026 mengalami volatilitas tinggi, ditandai dengan kontraksi IHSG sebesar 18,49% sepanjang triwulan I 2026, yang menjadi salah satu performa terlemah di antara negara-negara *emerging markets*. Koreksi IHSG berikutnya sempat anjlok ke kisaran 5.500. Kondisi ini dipicu oleh evaluasi indeks global yang menyoroti tata kelola dan transparansi, depresiasi nilai tukar rupiah, dan risiko fiskal. Meski demikian, partisipasi investor domestik yang meningkat hingga 69% dari total nilai transaksi (triwulan II 2026), menunjukkan pasar modal Indonesia masih diminati oleh investor domestik. Peningkatan dominasi investor domestik ini membantu memperkuat basis pendanaan pasar modal sehingga volatilitas akibat perubahan posisi investor asing menjadi relatif lebih terbatas.

AVERAGE DAILY VALUE - BREAKDOWN BY INVESTOR

Domestic vs Foreign



Grafik 20. Perkembangan Transaksi di Pasar Modal Berdasarkan Investor Data Kuartalan

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2026

Berbagai indikator menunjukkan sektor jasa keuangan dan pasar modal mulai menghadapi penyesuaian di tengah gejolak global. Meski sepiantas kondisi sektor jasa keuangan dan pasar modal terlihat resilien, adanya tekanan pada beberapa indikator menunjukkan kebijakan OJK masih menghadapi keterbatasan dalam mengembalikan kepercayaan investor global. Di saat yang sama, persepsi investor asing tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti likuiditas global, arah suku bunga negara maju, dan dinamika geopolitik. Upaya penguatan transparansi dan tata kelola pasar modal juga belum sepenuhnya menghilangkan kehati-hatian investor terhadap aset negara berkembang. Hal tersebut tercermin dari kontraksi IHSG sepanjang triwulan dan semester 1 2026. Selain itu, posisi Indonesia dalam indeks MSCI masih berada di bawah tinjauan, sehingga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi pasar dalam mengalokasikan aset di pasar modal Indonesia.

Kesimpulan

Pelemahan Rupiah sepanjang awal 2026 dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak dunia, serta ketegangan geopolitik mendorong *capital outflow* dan meningkatkan permintaan aset *safe-haven*. Sementara dari sisi domestik, tekanan berasal dari defisit neraca pembayaran, ketergantungan impor, serta ketidakseimbangan *supply-demand* valuta asing. **Pelemahan ini juga diperburuk oleh faktor non-fundamental, seperti memburuknya sentimen investor dan perilaku *risk-off*.**

Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan menempuh koordinasi kebijakan melalui jalur moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan. Berbagai indikator menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mulai memberikan respons pada masing-masing kanal transmisinya. Di sisi moneter, minat terhadap aset berdenominasi Rupiah meningkat, tercermin dari perkembangan instrumen SRBI serta meredanya tekanan arus modal keluar di pasar keuangan. Di sisi fiskal, APBN tetap menjalankan fungsinya sebagai *shock absorber* sekaligus menjaga keberlangsungan pembiayaan pemerintah, meskipun pasar masih mencermati bahwa kualitas belanja negara masih belum efektif dan adanya kekhawatiran terkait keberlanjutan penerimaan serta kebutuhan pembiayaan ke depan. Sementara itu, dari sisi sektor jasa keuangan, risiko likuiditas dan pasar masih menjadi tantangan dalam ketahanan perbankan. Perkembangan di pasar modal juga belum sepenuhnya diikuti oleh stabilisasi nilai tukar Rupiah. Rupiah masih berada di bawah tekanan, sementara persepsi investor global terhadap pasar keuangan Indonesia juga belum sepenuhnya pulih, termasuk dengan masih berlanjutnya proses peninjauan pasar modal Indonesia dalam indeks MSCI. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi kebijakan masih dipengaruhi oleh kuatnya tekanan eksternal, tingginya *uncertainty premium*, serta sejumlah tantangan domestik yang masih berlangsung.

Rekomendasi Kebijakan

1. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu diintensifkan dan diformulasikan dengan lebih jelas dalam rangka memperkuat ketersediaan pasokan valuta asing domestik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) oleh PT DSI, perluasan penggunaan Local Currency Transaction (LCT), serta pendalaman pasar valas domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memperbaiki keseimbangan *supply-demand* valuta asing, di mana hal ini yang menjadi salah satu sumber tekanan terhadap rupiah.
2. Koordinasi komunikasi kebijakan antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan KSSK harus diperkuat agar respons pasar keuangan dan nilai tukar lebih efektif di tengah tingginya volatilitas global.
3. Pemerintah perlu memperkuat kualitas belanja negara, keberlanjutan penerimaan negara (*revenue sustainability*), serta meningkatkan efektivitas komunikasi dan implementasi sejumlah kebijakan baru, terutama di tengah tingginya sensitivitas APBN terhadap pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga minyak dunia, sekaligus membangun kepercayaan investor terhadap sustainabilitas fiskal Indonesia.
4. Pemerintah perlu mempercepat upaya pengurangan ketergantungan terhadap impor energi dan bahan baku melalui diversifikasi sumber energi dan peningkatan kapasitas produksi domestik untuk mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan kebutuhan valuta asing, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga global.

Pertanyaan Kunci:

Apakah level kurs saat ini merupakan titik keseimbangan baru (*New Normal*), atau masih mungkinkah Rupiah ditarik kembali ke level historis sebelumnya?

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2020). Tabel Input-Output 185 Produk Periode 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Siaran Pers: Ekonomi Indonesia Resilien dan Tumbuh Solid Pada Triwulan 1 2026 <https://www.bps.go.id/id/news/2026/05/06/910/ekonomi-indonesia-resilien-dan-tumbuh-solid--pada-triwulan-1-2026.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia April 2026. Berita Resmi Statistik No. 55/06/Th.XXIX, 2 Juni 2026.
- Bank Indonesia. (2026). ASEAN+3 Tingkatkan Ketahanan Kawasan Lewat Penguatan Jaring Pengaman Keuangan. Siaran Pers Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_289326.aspx
- Bank Indonesia. (2026). Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Memperkuat Kerja Sama Bilateral untuk Mendorong Stabilitas Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan. Siaran Pers Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2810126.aspx
- Bank Indonesia. (2026). BI-Rate Naik 25 bps menjadi 5,50%: Kebijakan Lanjutan Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah. Siaran Pers Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2811926.aspx
- Bank Indonesia. (2026). BI-Rate Naik 25 bps menjadi 5,75%: Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Siaran Pers Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2812626.aspx
- Bank Indonesia. (2026). Cadangan Devisa April 2026 Tetap Tinggi. Siaran Pers. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_289626.aspx.

- Bank Indonesia. (2026). Laporan Survei Konsumen Maret 2026. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/SK-Maret-2026.aspx>.
- Bank Indonesia. (2026). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Juni 2026. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Pages/SEKI-JUNI-2026.aspx>.
- Bank Indonesia. (2026). Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Juni 2026.
- Bloomberg. FX Center - Bloomberg. Bloomberg.Com. <https://www.bloomberg.com/fx-center>.
- Bursa Efek Indonesia. (2026). IDX Quarterly Statistics Equity Market Q1 2026.
- Bursa Efek Indonesia. (2026). IDX Weekly Statistics, January – May Reports.
- CEIC. (2026). Indonesia Real Effective Exchange Rate, 1994 – 2026 | CEIC Data. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/real-effective-exchange-rate>.
- Fachrezzy, Ahmad Rafiq, Shakti Brammaditto Widya. (2026). Apa Penyebab Perang Iran dan Amerika-Israel? Ini Pemicunya. detikjogja. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8388390/apa-penyebab-perang-iran-dan-amerika-israel-ini-pemicunya>.
- FRED. (2026). Real Broad Effective Exchange Rate. <https://fred.stlouisfed.org/series/RBPHBIS>
- Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia. (2025). Industri Farmasi Terdampak Pelemahan Rupiah, 95 Persen Bahan Baku Obat Masih Impor.
- Gaikindo. (2026). Hino Perkuat Produksi di Indonesia, dengan Kekuatan Investasi 112 Juta Dolar AS dan TKDN 71,85%.
- GovBonds. (2026). Indonesia 5 Years CDS - Historical Data. CDS Historical Data. *World Government Bonds*. <https://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/indonesia/5-years/>.
- IDNFinancial. (2026). MBG akan dipangkas lagi demi hemat APBN Rp50 triliun per tahun. [idnfinancials.com.https://www.idnfinancials.com/id/news/63334/mbg-akan-dipangkas-lagi-demi-hemat-apbn-rp50-triliun-per-tahun](https://www.idnfinancials.com/id/news/63334/mbg-akan-dipangkas-lagi-demi-hemat-apbn-rp50-triliun-per-tahun).
- International Monetary Fund. (2026). *World Economic Outlook, April 2026: Global Economy in the Shadow of War*. International Monetary Fund, 2026. <https://doi.org/10.5089/9798229042758.081>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Advetorial RAPBN 2026
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). APBN KiTa Edisi Juni 2026. [https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1d8d479f-8d4e-41a2-9823-ab2ede4234d2/Publikasi-Paparan-Web-Konpers-APBN-KiTa-\(Juni-2026\).pdf?ext=.pdf](https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/1d8d479f-8d4e-41a2-9823-ab2ede4234d2/Publikasi-Paparan-Web-Konpers-APBN-KiTa-(Juni-2026).pdf?ext=.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal: Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2026 Disepakati pada Sidang Paripuna. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2025/07/24/4543-asumsi-dasar-ekonomi-makro-rapbn-2026-disepakati-pada-sidang-paripuna>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Kondisi Sistem Keuangan Tetap Solid di Tengah Ketidakpastian Global, Didukung Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Antarotoritas. Siaran Pers Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-KSSK-II-2026>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Konferensi Pers APBN KiTa Mei 2026.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Nota Keuangan RAPBN TA 2026.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Menuju 'Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Siaran Pers Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-RAPBN-Tahun-Anggaran-2026>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Hingga Akhir Tahun 2026. Siaran Pers Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Tidak-Ada-Kenaikan-Harga-BBM-Bersubsidi>

- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). Analisis Pembangunan Industri: Tantangan Peningkatan Kinerja Industri Elektronik di Indonesia. *Edisi V-2021*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). Analisis Pembangunan Industri: Membangun Kemandirian Industri Farmasi Nasional. *Edisi II-2021*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). Analisis Pembangunan Industri: Upaya Industri Otomotif Bangkit dari Pandemi. *Edisi II-2022*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025). Siaran Pers: Industri Kimia Berperan Penting Memacu Ekonomi Tumbuh 8 Persen. <https://kemenperin.go.id/artikel/25804/Industri-Kimia-Berperan-Penting-Memacu-Ekonomi-Tumbuh-8-Persen>
- Kompas. (2026). Antara Global dan Domestik, Faktor Apa yang Sebabkan Rupiah Melemah? KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2026/04/23/173000426/antara-global-dan-domestik-faktor-apa-yang-sebabkan-rupiah-melemah>.
- Konfrontasi. (2026). BI: Neraca Pembayaran Triwulan I 2026 Defisit US\$9,1 Miliar. Konfrontasi for Justice and Truth. <https://www.konfrontasi.com/2026/05/bi-neraca-pembayaran-triwulan-i-2026.html>
- Kontan. (2026). Kinerja Industri Kimia Bepeluang Pulih pada 2026, Ini Faktor Pendorongnya. *Kontan.co* <https://industri.kontan.co.id/news/kinerja-industri-kimia-bepeluang-pulih-pada-2026-ini-faktor-pendorongnya>
- Mediatama, Grahanusa. (2026). BI Perketat Aturan Valas, Mampukah Rupiah Tahan dari Tekanan Global? *kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-perketat-aturan-valas-mampukah-rupiah-tahan-dari-tekanan-global>.
- Noveliana, Cesilia Sasanda Eka Putri. (2026). Berapa Dolar AS Saat Krismon 1998? Ini Kondisinya. *FORTUNE Indonesia*, 7 April 2025. <https://www.fortuneidn.com/finance/berapa-dolar-as-saat-krismon-1998-00-fykp7-grxwz5>.
- OECD. (2026). *OECD Economic Outlook, Interim Report March 2026*. Vol. 2025. OECD Economic Outlook. OECD Publishing, 2026. <https://doi.org/10.1787/d4623013-en>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). SP 30 Moody's Tegaskan Ketahanan Ekonomi Indonesia, Peringkat Dipertahankan di Tengah Dinamika Global.
- Simanjuntak, Surya Dua Artha. (2026). Pemerintah Siap Terbitkan Panda Bond Juni 2026. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20260506/9/1971898/pemerintah-siap-terbitkan-panda-bond-juni-2026>.
- Tempo. (2026). Apa Saja Pemicu Harga Minyak Dunia Tembus US\$ 115 per Barel. https://www.tempo.co/ekonomi/apa-saja-pemicu-harga-minyak-dunia-tembus-us-115-per-barel-2120649#google_vignette.
- Tempo. (2026). Mengapa BI Anggap Nilai Tukar Rupiah Undervalued. *tempo.co*. <https://www.tempo.co/video/arsip/arsip/mengapa-bi-anggap-nilai-tukar-rupiah-undervalued-2133612>.
- Trading Economics. (2026). *Currency Exchange Rates*. <https://tradingeconomics.com/currencies>.
- ULASAN. (2026). Rupiah Masuk 5 Besar Mata Uang Terlemah Dunia 2026 Versi Forbes. *Ulasan.co*. <https://ulasan.co/rupiah-masuk-5-besar-mata-uang-terlemah-dunia-2026-versi-forbes/>.
- Warta Ekonomi. (2026). DHE SDA Resmi Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Parkir Dana di Himbara. <https://wartaekonomi.co.id/read610529/dhe-sda-resmi-berlaku-1-juni-2026-eksportir-wajib-parkir-dana-di-himbara?page=all>